

## **FRAGMENTASI, SEJARAH, HETEROGENITAS PENDUDUK, DAN BUDAYA KOTA PONTIANAK**

**Galuh Bayuardi, Andang Firmansyah, Superman**

Pendidikan Geografi IKIP PGRI Pontianak,  
Jl. Ampera No. 88, Pontianak Barat  
e-mail: zegavon@gmail.com

Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Tanjungpura,  
Jl. Hadari Nawawi Pontianak Kalimantan Barat,  
e-mail: andang.firmansyah@gmail.com

Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Tanjungpura,  
Jl. Hadari Nawawi Pontianak Kalimantan Barat,  
e-mail: namakusuperman@gmail.com

### **Abstrak**

*Pontianak merupakan kota madya di Indonesia. Secara geografis, lokasi Pontianak dekat dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Kondisi ini menyebabkan Pontianak sering dikunjungi pelancong dari negara tetangga, baik pengunjung yang memiliki urusan di Kota Pontianak, maupun yang sekadar singgah sebelum menuju destinasi lain di wilayah Indonesia. Jika ditelusuri dari sejarahnya, pada dasarnya Pontianak didesain sebagai kota perdagangan. Pontianak mengalami pembangunan yang cepat saat kedatangan VOC yang membuat kesepakatan dengan Kesultanan Pontianak. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan itu, mereka membangun kantor pemerintahan dan juga keraton untuk mendukung aktivitas politik di Pontianak. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan Kota Pontianak, berbagai kelompok etnis menjadikan Pontianak sebagai kota yang heterogen. Kini, Pontianak dikunjungi berbagai etnis dari berbagai wilayah di Indonesia. Kelompok etnis yang tinggal di Pontianak di antaranya adalah Melayu, Dayak, Tionghoa, Jawa, Batak, Bugis, Madura, Banjar, Sunda, dan Bali. Berbagai etnis bergaul satu sama lain. Kondisi sosial heterogen di Pontianak tidak serta merta melahirkan pluralitas. Terkadang muncul sentimen kedaerahan baik itu klaim oleh penduduk lokal, maupun oleh mereka yang ditandai sebagai pendatang, meskipun pernyataan ini tidak terlihat secara langsung, tapi memiliki potensi masalah di kemudian hari.*

**Kata kunci:** sejarah, Pontianak, heterogenitas

## **FRAGMENTATION, HISTORY, POPULATION HETEROGENITY, AND CULTURAL OF PONTIANAK CITY**

### **Abstract**

*Pontianak is one of municipality in Indonesia. Geographically Pontianak location, is a region close to neighboring countries such as Malaysia and Singapore. This condition causes the Pontianak often visited by travelers from neighboring countries either intentionally been to Pontianak Municipality and those who simply stopped to proceed to the main destinations in Indonesia other region. If traced far back on the history, basically Pontianak was designed to be a commercial city. Pontianak experiencing rapid development when VOC entrance and made an agreement with the ruler of Pontianak sultanate. As a follow up of the agreement, they established government offices and also the castle to support the political activities in Pontianak. Along with the rapid growth of the Pontianak city, various ethnic groups from within and outside the island of Borneo began to arrive. The arrival of the various ethnic groups making Pontianak as one of the cities where the population is heterogeneous. Today, Pontianak is much visited various ethnic groups from various regions in Indonesia. Ethnic groups who live in Pontianak, among others are Malay, Dayak, Chinese, Javanese, Batak, Bugis, Madurese, Banjar, Sunda, Bali, etc. Various ethnic coexistence between ethnic group and mingle with one another. Conditions heterogeneous society in Pontianak do not necessarily give birth to plurality. Sometimes it appears regionalist sentiment either of those claiming to be local residents as well as those who are considered immigrants even though it is not exposed directly but has the potential to become a problem in the future.*

**Keywords :** history, Pontianak, heterogeneous

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan sebuah kota berkaitan erat dengan dinamika penduduk sebagai penghuninya, baik mereka yang bermukim sejak awal maupun pendatang yang kemudian memilih untuk tinggal menetap. Dinamika ini kemudian menjadi penyebab keragaman etnis penduduk kota. Pada kota-kota besar, keragaman etnis terkadang merupakan hal yang lazim.

Seiring dengan tumbuh berkembangnya kota tersebut, jumlah penduduk semakin bertambah, keragaman etnis juga semakin meningkat, dan terciptalah sikap individualis. Bagi masyarakat di kota-kota besar perubahan adalah hal yang lazim terjadi. Mereka cenderung menerima perubahan secara terbuka. Perbedaan budaya dan pola hidup antar individu maupun kelompok masyarakat tidak menjadi masalah serius antarsatu sama lainnya.

Hal ini dikarenakan mereka yang hidup di kota besar, pada umumnya telah *urbanized* (terurbanisasi, atau telah menjadi kaum urban). Berbeda halnya dengan masyarakat di kota menengah yang cenderung berpola *pseudo-urban*. Masyarakat pada kota ini masih dalam masa transisi, sehingga sikap keterbukaan terhadap perubahan terkadang masih belum memadai. Jika pun mereka mengaku sebagai masyarakat yang terbuka, namun masih pada tataran tertentu yang sangat rendah.

Sejarah perkembangan kota di Indonesia pada umumnya tidak terlepas dari pengaruh pendudukan pemerintah Kolonial Belanda, yang menyebar ke berbagai wilayah di Nusantara kala itu. Kota-kota berkembang seiring dengan perannya dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pada kota-kota yang berfungsi sebagai pusat-pusat perdagangan, maupun yang memiliki pola hubungan dagang suatu wilayah dengan wilayah lainnya.

Salah satu indikator perkembangan sebuah kota adalah perkembangan aspek sosial-budaya. Perubahan pola kehidupan dan tata cara masyarakat dalam sebuah kota sering kali disebabkan oleh pengaruh luar, serta perkembangan komunikasi dan sistem informasi. Namun demikian, beberapa hal yang terjadi tidak demikian di Kota Pontianak. Hal inilah yang mendorong penulis berusaha membahas perkembangan Kota Pontianak, secara deskriptif menggunakan pendekatan historis. Pembahasan berusaha mengungkap (1) sejarah berdirinya Kota Pontianak, (2) kedatangan Belanda di Kalimantan Barat, (3) gelombang migrasi ke Pontianak, dan fragmentasi sosial. Bahan bahasan dari data sekunder yang berupa beberapa dokumen dan pustaka yang tersedia di perpustakaan daerah maupun di perpustakaan Universitas Tanjungpura Pontianak.

## II. SEJARAH BERDIRINYA KOTA PONTIANAK

Pulau Borneo adalah salah satu pulau terbesar di dunia yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Selat Makasar, Laut Jawa, dan Selat Malaka, serta terletak di jalur lalu lintas laut dunia. Nama Borneo sendiri diambil dari Kesultanan Brunei. Bagi orang Indonesia biasa menyebut pulau ini dengan sebutan Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan sendiri berarti “sungai intan”, akan tetapi ada juga yang mengartikan sebagai “tanah sagu mentah (*lamantan*)” merupakan tanaman yang tumbuh lebat di daerah rawa-rawa. Pulau Kalimantan sendiri bisa dikatakan hampir tertutup dari pengaruh-pengaruh luar dikarenakan sedikitnya jalan masuk. Sungai-sungai besar berarus deras jika musim penghujan dan surut ketika musim kemarau, ditambah lagi di bagian muaranya terdapat banyak pasir sehingga menyulitkan kapal-kapal besar untuk masuk kedalam (Heidhues, 2008:1).

Pulau Kalimantan sendiri pada masa kolonial terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebelah utara dikuasai oleh Inggris dan sebelah selatan dikuasai oleh Belanda. Wilayah jajahan Belanda dibagi atas “*Westerafdeling van Borneo*” (Bagian Barat Kalimantan), dan “*Zuider en*

*Oosterafdeling van Borneo*” atau Bagian Selatan dan Timur Kalimantan (Sjamsuddin, 2013, hal:31). Belanda kemudian memusatkan Bagian Selatan di Berau dan bagian Timur di Kutai, sedangkan di bagian Barat berpusat di Pontianak dan Kota Waringin (Gin, 2011:11-12). Sekarang ini Kota Pontianak merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki keunikan dilewati garis khatulistiwa. Selain itu, Sungai Kapuas dan Sungai Landak membelah di tengah-tengah Kota Pontianak, sehingga setiap harinya dapat dilihat kapal-kapal besar dan kecil menyusuri sungai tersebut menuju ke hulu maupun ke hilir.

Keberadaan sungai inilah yang membuat Kota Pontianak memiliki dinamika yang berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia. Daerah Sungai Kapuas sendiri dibagi menjadi tiga bagian yaitu dari ujung paling atas sungai (Gunung Cemar) sampai Kota Putus Sibau disebut bagian atas (hulu); kedua dari Putus Sibau ke hilir sampai Kota Tayan terbentuk delta disebut tengah, dan sampai ke laut disebut daerah hilir. Di daerah aliran Sungai Kapuas bagian hulu dan tengah pada masa lampau terdapat sejumlah kerajaan, yaitu Bunut, Jongkong, Piasa, Selimbau, Suhaid, Silat, Sintang, Sekadau, Sanggau, Meliau, dan Tayan. Di daerah aliran hilir sungai sampai ke delta dan laut terdapat Kerajaan Pontianak, Simpang, dan Kubu. Di sepanjang pantai terdapat kerajaan-kerajaan yaitu Matan, Sukadana, Landak, dan Sambas (Sjamsuddin, 2013:32-33). Masing-masing kerajaan tersebut memiliki perkembangan sendiri-sendiri sesuai dengan wilayah yang dikuasainya.

Eksistensi Kerajaan Islam di Indonesia tidak dapat lepas dari penyebaran agama itu sendiri. Banyak teori tentang kedatangan Islam di Indonesia termasuk juga asal mula tempatnya. Dalam kitab *'Ajain al-Hind*, salah satu sumber berbahasa Persia mengisyaratkan bahwa adanya komunitas Islam lokal di wilayah Kerajaan Hindu-Buddha Zabaj (Sriwijaya). Kitab yang ditulis oleh Buzurg bin Shahriyar al-Ramhurmuzi sekitar tahun 390 H/1000 M menceritakan tentang kunjungan para pedagang Islam ke kerajaan Zabaj. Dalam kitab itu diceritakan bahwa setiap orang Islam baik penduduk lokal maupun pendatang harus duduk dengan cara bersila. Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab bukan dari India. Hal tersebut sesuai dengan kesimpulan seminar yang diselenggarakan pada tahun 1969 dan 1978 tentang kedatangan Islam di Indonesia (Azra, 2013:7-8).

Pedagang-pedagang dari Arab tersebut kemudian ada yang melakukan perkawinan dengan penduduk setempat kemudian tinggal menetap. Beberapa di antaranya mendapatkan kehormatan untuk menyandang gelar *syarif* atau *syekh* dan mempunyai pengaruh besar di kalangan raja-raja seperti Palembang, Banjarmasin, Cirebon, Siak, dan Pontianak (Veth, 1992:31). Sebagai syarif, pengaruhnya luas sampai pada bidang ekonomi dan agama, seperti beberapa kejadian yang telah memperoleh kekuasaan politik yang besar, bahkan ada yang berhasil menggeser dinasti yang berkuasa, dan juga ada membangun kerajaan baru dengan berkuasa penuh dan berdaulat sendiri, seperti halnya Kerajaan Pontianak (Hasanuddin, Purwana, & Sulistyorini, 2000:11-12).

Awal mula Kerajaan Pontianak dimulai dari kedatangan Al-Habib Husin yang masih berusia 22 tahun bersama-sama dengan Al-Saiyid Umar Al-Saggaf, Al-Saiyid Abubakar Al-Idrus, dan Al-Saiyid Muhammad bin Achmad Quraisy dari Kota Hadrilmaut, Arab Selatan. Ini telah memberikan arti penting dalam sejarah, bukan hanya pendirian Kerajaan Pontianak tetapi juga hubungannya dengan Kerajaan Matan dan Kerajaan Mempawah. Mereka meninggalkan Kota Trim Hadrilmaut guna mencari kehidupan baru serta memperkenalkan dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Tujuan pertamanya adalah Aceh dan dalam perjalanannya mereka menyinggahi daerah Trengganu (Negara Bagian Malaysia). Kemudian Al-Sayid Muhammad bin Achmad Quraisy memilih untuk menetap di daerah tersebut.

Ketiganya melanjutkan perjalanan ke Aceh, akan tetapi Al-Habib Husin dan Al-Saiyid Abubakar Al-Idrus memilih menetap di Aceh. Dari Aceh, Al-Saiyid Abubakar Al-Idrus

meneruskan perjalanannya dan menetap di Siak. Setelah beberapa lama menetap di Aceh, Al-Habib Husin meninggalkan Aceh dan menetap di Batavia selama kurang lebih satu tahun. Pada tahun 1733 Al-Habib Husin kembali melakukan perjalanan ke Semarang. Di Semarang ia bertemu dengan Syekh Salim Hambal dan diangkat sebagai muridnya. Al-Habib Husin menetap selama dua tahun dan atas saran dari Syekh Salim Hambal. Pada tahun 1735 mereka berangkat bersama-sama menuju ke Matan dan menetap sebagai penyebar ajaran agama Islam (Veth, 1992:249). Di sana, Al-Habib Husin diangkat menjadi mufti penghulu agung kerajaan bertugas untuk mengadili masalah-masalah sosial, politik, dan keagamaan dalam kerajaan.

Al-Habib Husin dianggap sebagai orang yang adil dan bijaksana dalam mengadili setiap perkara. Akan tetapi karena ada permasalahan dengan Raja Mempawah perihal pengambilan keputusan terhadap nakhoda Achmad dari Siantan akhirnya Al-Habib Husin meminta perlindungan kepada Opu Daeng Manambon Raja Kerajaan Mempawah. Di Kerajaan Mempawah, Al-Habib Husin dihormati dan cukup berpengaruh. Oleh sebab itu Al-Habib Husin kembali diangkat menjadi Mufti dan Patih serta menetap selama kurang lebih 15 tahun. Kemudian pada tanggal 3 Dzulhijah 1184 H (1770 M) Al-Habib Husin wafat dan dimakamkan di Sejegi, Mempawah (Hasanuddin, 2014:21-22).

Berdirinya Keraton Pontianak tidak lepas dari Peranan Sultan Syarif Abdurrahman, putra dari Al-Habib Husin dari perkawinan dengan Putri Nyai Tua yang berasal dari Matan. Syarif Abdurrahman lahir di Matan, pada hari Senin 15 Rabiul Awal 1154 atau 1742 M (Veth, 1992:249-250). Di masa mudanya Syarif Abdurrahman adalah seorang yang memiliki tekad dan ambisi kuat. Dia pernah melakukan perjalanan sampai ke Siak dan Palembang, kemudian berhasil menjalin hubungan dagang dengan daerah tersebut. Syarif Abdurrahman juga memiliki hubungan yang baik dengan Opu Daeng Menambon. Syarif Abdurrahman sempat singgah di Banjarmasin dan berhasil mengalahkan jung-jung Cina serta Kapal Francis di Pasir (Kalimantan Timur). Akan tetapi karena Syarif Abdurrahman ikut campur dalam urusan Kerajaan di Banjarmasin akhirnya ia dimusuhi dan kembali ke Mempawah.

Pada abad ke-18 VOC sudah melakukan kegiatan dagang di wilayah Kalimantan Barat, terutama dengan Kerajaan Landak untuk mencari komoditas intan dan lada. Akan tetapi kapal-kapal VOC yang membawa barang dagangan tersebut diserang oleh bajak laut di muara Sungai Kapuas. Karena terus menerus diserang dan menimbulkan kerugian akhirnya VOC ingin menumpas bajak laut tersebut. VOC kemudian meminta bantuan dari Kerajaan Mempawah dan diperintahkan Syarif Abdurrahman untuk melaksanakannya. Dengan dibantu oleh pengikutnya dari orang-orang Bugis dia membawa 15 kapal kecil. Setelah menemukan sarang bajak laut di muara Sungai Kapuas (Batu Layang dan Nipah Kuning) akhirnya ditembakkanlah meriam, dan bajak laut pergi meninggalkan daerah tersebut.

Setelah berhasil mengusir bajak laut dari muara Sungai Kapuas kemudian Syarif Abdurrahman mengajak saudaranya untuk bermusyawarah membuka pemukiman baru. Akhirnya disepakati untuk membuka hutan di pertemuan Sungai Kapuas dan Sungai Landak karena letaknya yang strategis kemudian dikembangkan sebagai kerajaan baru yaitu Kerajaan Pontianak. Setelah membuka pemukiman kemudian mendirikan masjid yang sekarang dikenal dengan Masjid Jami dan mendirikan bangunan besar sebagai tempat tinggal serta pusat kegiatan. Kemudian karena letaknya strategis untuk kegiatan pelayaran dan perdagangan maka para pedagang Bugis, Melayu, dan Cina mulai tertarik untuk datang ke Pontianak, begitu juga pedagang dari wilayah daerah Sukadana, Sanggau, Mempawah, dan Sambas.

Pada awalnya sempat terjadi penolakan dari Kerajaan Landak dikarenakan lokasi Keraton Pontianak merupakan jalur masuk kegiatan perdagangan dan pelayarannya. Keraton Pontianak kemudian mendapatkan pengakuan dari VOC. VOC kemudian menekan

Panembahan Landak agar mau mengakui kekuasaan wilayah Keraton Pontianak. Karena jasa tersebut, VOC ikut serta dalam mengatur Kerajaan Pontianak dan mengajukan beberapa kontrak. Dengan kuatnya legitimasi kekuasaan Keraton Pontianak maka kemudian banyak orang-orang mendirikan perkampungan di sepanjang tepi Sungai Kapuas sehingga Kerajaan Pontianak menjadi semakin berkembang pesat (Hasanuddin, 2014:23-25).

### **III. KEDATANGAN BELANDA DI KALIMANTAN BARAT**

Setelah VOC dibubarkan karena permasalahan keuangan yang melilitnya, ditambah persaingan dengan kongsi dagang Inggris (EIC) semakin menambah permasalahan di dalam VOC. Hingga akhirnya VOC resmi dibubarkan oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 31 Desember 1799. Sebagai konsekuensinya maka Pemerintah Belanda mengambil alih semua aset dan kegiatan usahanya, di samping harus melunasi semua hutang-hutang VOC. Oleh sebab itu ditugaskanlah Van den Bosh untuk menutupi semua hutang-hutang tersebut dalam waktu yang singkat hingga dicetuskanlah *cultuur stelsel* (Tanam Paksa) (Ricklefs, 2011:183).

VOC telah meninggalkan Kalimantan Barat selama dua puluh tahun, akan tetapi para penguasa Melayu di Kalimantan khususnya Sultan Pontianak yang sedang berkuasa masih bergantung kepada Belanda. Setelah Inggris meninggalkan beberapa daerah milik Belanda kemudian para penguasa Sambas dan Pontianak meminta bantuan kepada Belanda untuk kembali. Bahkan Sultan Sambas menulis surat permohonan kepada Residen Semarang pada bulan Maret 1817. Sultan Sambas merasa terancam dengan Pontianak dan memiliki hubungan buruk dengan para penambang Tionghoa. Oleh karena itu Sultan Sambas berhadapan Kompeni memiliki kesempatan untuk membuktikan kesempatan baik dengan memberikannya sebuah kapal perang yang kuat persenjataan, dan amunisi. Namun demikian pada waktu yang sama ternyata Sultan Sambas juga berkirim surat ke Inggris tanpa sepengetahuan Belanda.

Akhirnya Belanda menyetujui permintaan tersebut akan tetapi Sultan Sambas harus bersedia menandatangani suatu perjanjian dengan Belanda. Sayangnya Belanda tidak pernah menyinggung mengenai pengiriman persenjataan. Menurut catatan dari Komisariss Nahuyss (dalam Heidhues, 2008:66) penguasa Sambas meminta Belanda untuk menduduki Sambas dalam rangka untuk menghindarkan diri dari ancaman kekuatan dari kaum Tionghoa yang mungkin suatu saat akan melakukan kudeta. Kemudian langkah ini diikuti oleh Sultan Pontianak, yang hendak memperbaharui hubungan persahabatan dengan Belanda dan ingin mengundang kembali ke Pontianak. Menurut naskah Surat Syarif Kasim, Sultan kedua Pontianak, Syarif Kassim sendirilah, sebagai bekas penguasa Mempawah, yang menyambut dengan ekspresi yang hangat atas persahabatan dengan pihak Batavia (Heidhues, 2008:67).

Walaupun VOC sudah menjalin kontak dengan Kalimantan Barat akan tetapi belum mendirikan kantor perwakilan secara permanen. Setelah VOC dibubarkan, Belanda memerlukan waktu dua tahun untuk kembali lagi ke Kalimantan. Antara Inggris dan Belanda saling memperebutkan wilayah Kalimantan Barat karena memiliki kepentingan masing-masing. Inggris ingin menguasai Pantai Barat Kalimantan untuk mengamankan pelayarannya ke China, sedangkan Belanda mempunyai kepentingan kolonial, yaitu dalam menghadapi bajak laut dari utara dan melawan Cina yang merupakan musuh Belanda (Ricklefs, 2001:60).

Pada bulan Juli 1818 Belanda mendirikan kantor permanen di Pontianak dan mulai menyatakan kekuasaannya atas seluruh wilayah itu. Misi Belanda ke Pontianak di bawah pimpinan Kapten Elout yang menemani komisariss pemerintah pertama. Kedatangan Belanda di Kalimantan Barat disambut baik oleh Sultan Syarif Kasim. Pemerintah Belanda ikut campur tangan dalam urusan kerajaan dan membatasi kekuasaan sultan, akan tetapi Sultan menolak campur tangan tersebut. Sultan juga menolak untuk menyetujui perjanjian yang

telah dibuat dengan Pemerintah Belanda.

Sultan beranggapan bahwa Pemerintah Belanda di Pontianak adalah untuk membantu dalam melindungi kekuasaannya, bukan untuk mengatur kerajaan. Pemerintah Belanda juga memerintahkan kepada kongsi-kongsi China di Pontianak untuk tunduk dalam kekuasaannya dengan membatasi kekuasaannya. Akan tetapi kongsi-kongsi tersebut menolaknya sehingga pada akhirnya nanti menimbulkan perlawanan kepada Pemerintah Belanda. Hal tersebut diperparah dengan adanya penyeludupan candu di wilayah Kalimantan Barat yang notabene merupakan wilayah Pemerintah Belanda (Hasanuddin, 2014:55-56).

Kekayaan emas yang ada di Kalimantan Barat sudah diberitakan sejak masa pemerintahan Inggris di Indonesia sekitar tahun 1811. Pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles memerintahkan J. Burn untuk menuliskan mengenai keadaan di Kalimantan Barat termasuk jumlah kekayaan emas yang diekspor setiap tahunnya. Laporan tersebut membuat Raffles terkejut karena emas yang dikirim keluar Kalimantan Barat jumlahnya sangat melimpah. Tidak banyak sumber yang bisa menuliskan seberapa banyak emas yang dipakai penguasa lokal maupun yang dikirimkan ke luar (dalam Heidhues, 2008:37). Dan juga mengenai daerah tempat tujuan ekspor juga belum diketahui secara pasti, diperkirakan dibawa ke China, kawasan Asia Tenggara, ataupun kawasan Asia Selatan.

#### **IV. GELOMBANG MIGRASI KE PONTIANAK**

Untuk menuliskan tentang migrasi ke Pontianak perlu mengetahui migrasi penduduk di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Penduduk yang datang ke Kalimantan Barat sangatlah beragam. Oleh sebab itu di sini dituliskan suku (etnis) bangsa yang paling lama dan paling banyak secara kuantitas yang telah mendiami wilayah Kalimantan Barat. Karena letak wilayah Kalimantan Barat yang strategis dan juga kekayaan alam yang melimpah, banyak menarik penduduk dari luar wilayah untuk masuk dan menetap. Tiga kelompok etnis utama yang disebut sebagai tiga pilar telah mendominasi sejarah Kalimantan Barat yaitu Dayak, Melayu, Cina (Heidhues, 2008:7).

Pertama, yang dikenal adalah Orang Dayak yang umumnya dipandang sebagai orang asli Kalimantan. Nama "Dayak" sendiri sebenarnya terdiri dari berbagai ragam kelompok yang jumlahnya mencapai sekitar 40 persen dari total penduduk di Provinsi Kalimantan Barat. Ciri khas yang membedakan antara sub-etnis Dayak dari kelompok-kelompok lainnya adalah dari perbedaan bahasa atau sistem sosial mereka, dalam mengolah padi di sawah atukah huma atau penduduk yang menetap maupun yang berpindah-pindah. Dalam kajian antropologi hal ini sangat penting untuk dijelaskan.

Bagi orang Dayak yang hidup di dekat pantai atau sepanjang aliran sungai utama kadangkala disebut sebagai "Dayak Melayu" karena proses kebudayaan dan bahasa mereka mirip dengan orang Melayu. Batas di antara mereka menjadi "keropos" dengan banyaknya orang Dayak yang menyeberangi batasnya dan menjadi lebih "Melayu" tanpa meninggalkan identitas Dayak yang telah dimiliki sebelumnya. Beberapa penguasa Melayu juga melakukan perkawinan dengan keluarga-keluarga pemimpin Dayak seperti Opu Daeng Manambon. Penguasa-penguasa Melayu sering menggunakan jasa orang Dayak sebagai tenaga kerja, perbekalan, dan prajurit. Bagi orang Belanda memandang orang Dayak sebagai kelompok yang banyak diperas orang Cina (Heidhues, 2008:8-11).

Kedua adalah orang Melayu yang mewakili sekitar 40 persen jumlah penduduk di Kalimantan Barat. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah orang Dayak. Orang Melayu sebagai Muslim biasanya bebas dari pajak dan kerja paksa. Hal ini karena penguasa lokal

adalah Muslim oleh sebab itu “Masuk Melayu” merupakan cara yang paling mudah untuk menghindari tuntutan. Walaupun orang Dayak Muslim akan tetapi belum tentu diterima sebagai Melayu jika mereka belum menjalankan tradisi Melayu. Orang seperti ini pada abad ke-19 disebut sebagai anak bumi atau orang sungai (Heidhues, 2008:13).

Ketiga adalah tentang orang Cina yang datang di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara disebut sebagai orang Cina *Nanyang*. Keberadaan orang Cina di Indonesia dapat dikatakan sebagai pelengkap dari kolonialisme Belanda di Indonesia. Setelah Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda, kemudian mendirikan VOC untuk mengatur kegiatan dan kepentingan Belanda di Nusantara. Orang Cina juga diberikan banyak peran dan hak monopoli atas perdagangan candu, sarang burung walet, usaha perjudian, rumah gadai, usaha penyebaran perahu tambang, usaha pemotongan hewan, dan sebagainya (Poerwanto, 2014:54-55).

Kesuksesan Cina dalam membuat jaringan perdagangan sampai ke pelosok daerah cukup membuat khawatir Belanda. Untuk membatasi hal tersebut, maka pada tahun 1836 pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan peraturan khusus. Jika orang Cina akan bepergian selama beberapa hari, ia harus meminta izin terlebih dahulu dan yang melanggar akan mendapatkan denda sebesar f 25. Setelah digulirkannya Politik Etis pada tahun 1897 peraturan tersebut diperketat. Alasannya ini diterapkan untuk melindungi kaum bumiputera dari praktek pemerasan dan terlilit utang, maka kunjungan orang Cina ke daerah pedalaman dibatasi (Sjamsuddin, 2013:56).

Dua kelompok atau sub-etnis terbesar di Kalimantan Barat adalah Teochiou (M. Chaochou) dan Hakka. Perbedaan antara orang Hakka dan Teochiu tidak terlalu besar karena keduanya berasal dari orang Cina etnis Han. Orang Hakka biasa membuka ladang baru di Tiongkok oleh karena itu kedatangan di Kalimantan Barat disebut sebagai perintis. Orang Hakka ini cenderung bekerja sebagai petani, pertambangan, dan pedagang kecil di daerah pedalaman. Sedangkan orang Teochiu cenderung berkumpul di daerah perkotaan dan berdagang. Kini orang Teochiu banyak membentuk populasi terbesar orang Cina di Kota Pontianak (Heidhues, 2008:17).

Di antara tiga etnis besar yang masuk ke Kalimantan Barat tersebut ada beberapa etnis yang kemudian menyusul untuk masuk ke daerah ini termasuk Pontianak. Pada awal abad ke-18, Petualang Bugis dari Sulawesi masuk ke daerah ini dan bekerja sama dengan istana-istana kerajaan seperti Mempawah dan Sambas. Seperti orang Melayu, kelompok Bugis ini lainnya mengikuti pendahulunya mereka dan tidak hanya menjadi bangsawan atau pelayan tetapi juga pedagang. Kebanyakan anggota-anggota kelompok dari etnis ini sekarang tinggal di lingkungan sekitar Pontianak.

Imigran lain dari pulau-pulau lain di Indonesia mengikuti mereka termasuk orang Jawa. Hal ini karena dahulunya ada hubungan historis antara Kerajaan Sukadana dan Landak dengan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Banten. Kemudian ada orang Madura, orang Minangkabau, dan lainnya. Orang Arab memiliki sebuah tempat istimewa mengingat karena mereka adalah orang Muslim. Orang Arab sekarang ini telah berakulturasi dengan orang Melayu dengan cara melakukan perkawinan. Pada masa kolonial Belanda orang Arab juga dibebaskan dari pajak dan aturan tentang kepemilikan tanah (Heidhues, 2008:14-15).

## **V. FRAGMENTASI SOSIAL**

Wilayah Kota Pontianak yang relatif luas dengan jumlah penduduk relatif kecil pada saat itu, menarik para pendatang dari daerah sekitarnya untuk bermukim. Kelompok-kelompok

sosial berdasarkan etnis secara bergelombang menjadi beberapa periode dan terus terjadi hingga hari ini. Sejak awal perkembangan dan tumbuhnya Kota Pontianak sebagai kota niaga, pusat perdagangan serta tempat bertemunya para pedagang dari beberapa daerah baik dari wilayah Kalimantan Barat ataupun dari luar pulau lainnya. Keanekaragaman etnis yang berkumpul di kota Pontianak tinggal secara berkelompok-kelompok dalam satu bagian wilayah tertentu. Mereka berdomisili dari mulai tengah kota, sepanjang sungai, hingga ke pinggiran-pinggiran dan sudut kota.

Hal tersebut mengingatkan teori urbanisasi yang pernah dinyatakan oleh Maine, Wirth, dan Redfield dalam Bruner (1961). Teori urbanisasi yang berlaku di negara-negara barat, tidak begitu saja berlaku di beberapa pusat kota di wilayah Asia Tenggara. Sebagaimana bantahan terhadap teori klasik tersebut, di beberapa kota di negara-negara Asia, migrasi desa-kota yang merupakan proses dari urbanisasi tidak membuat serta-merta masyarakat menjadi sekuler, secara individu seseorang tidak menjadi terasing, kelompok-kelompok kekerabatan juga tidak hilang, ataupun relasi sosial di lingkungan kota tidak menjadi *impersonal, superficial*, dan hanya berdasarkan asas manfaat. Hal ini menjadi begitu sangat jelas perbedaan proses yang mengiringi perubahan secara sosial pada transisi dari kehidupan pedesaan menuju perkotaan, antara masyarakat di negara-negara Barat dengan negara-negara Asia.

Hal tersebut juga menunjukkan terjadinya gejala keragaman fragmentasi tetapi terdapat kecenderungan tidak membaaur terutama ketika dilihat dari pola tempat tinggal. Penggunaan bahasa masing-masing etnis terdengar dominan di ruang publik seperti pasar, pertokoan, ataupun warung kopi, bahkan di instansi-instansi pemerintahan. Fragmentasi sosial merupakan kata lain dari proses disosiasi atau sering disebut sebagai *oppositional processes* (Soekanto, 2001:97). Namun demikian, di Kota Pontianak secara historis hal ini bukanlah suatu perpecahan dari satu bagian menjadi beberapa bagian, namun kelompok-kelompok sosial ini memang sudah ada sejak awal.

Fenomena fragmentasi pergaulan, tempat tinggal, kelompok-kelompok sosial, dalam instansi dan badan usaha atau dalam mata pencaharian. Fragmentasi agama dan kepercayaan, mereka berkelompok berdasarkan kepercayaan atau agama, bahkan identitas etnis Melayu adalah orang yang menganut agama Islam, ketika seorang Tionghoa ataupun Dayak, berpindah kepercayaan menjadi muslim maka secara langsung mereka akan mengaku beridentitas Melayu. Alasan orang Dayak masuk “Melayu” adalah untuk menghilangkan pajak yang dibebankan kepada mereka (Heidhues, 2008:13).

Fragmentasi etnis, hal ini didasari oleh periode kedatangan kelompok dan tempat tinggal awal pada saat kedatangannya di Kota Pontianak. Baik itu di pusat kota atau pinggiran kota. Selain itu juga ditandai dengan toponimi perkampungan mereka. Selain itu, terdapat beberapa etnis yang dalam pandangan lokal masih selalu dikatakan “orang luar”, yaitu etnis Jawa dan Madura, walaupun beberapa di antara mereka sudah tiga generasi tinggal di Pontianak. Sebagian telah mengalami akulturasi misalnya dengan adanya perkawinan, ataupun karena pergaulan sosial yang lebih membaaur beberapa pribadi sehingga lebur dalam identitas Melayu dan tidak lagi menggunakan atau tidak dapat berbahasa Jawa.

Fragmentasi identitas juga terjadi bila merujuk pada fragmentasi seperti yang terjadi tersebut dapat dikatakan menunjukkan orientasi ataukah justru kondisi disorientasi identitas (Bartels & Wiemann, 2007:xi). Sementara identitas tersebut dapat ditandai dengan lokasi ataupun tempat beraktivitas, dan juga tujuan dari keberadaan kelompok tersebut di suatu tempat tersebut, serta ingatan ataupun kenangan baik memori tentang di daerah tujuan ataupun di daerah asal sebagai aktualisasi terhadap kerinduan daerah yang ditinggalkannya. Fragmentasi yang memang sudah terjadi sejak awal jika dilihat dari mulai masa pemerintahan Belanda. Berikut ini merupakan alasan mengapa fragmentasi tersebut terjadi.

- a. Pembagian otoritas yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda, Kerajaan Pontianak sebagai penguasa dan didukung untuk memperluas wilayah kekuasaannya, demi keamanan perniagaan Belanda. Tugas-tugas administrasi etnis Cina. Hal tersebut memunculkan stratifikasi masyarakat berdasarkan etnisitas,
- b. Penaklukan kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat oleh Kerajaan Pontianak,
- c. “Perampasan/ penyerobotan” dan klaim wilayah, lahan pertambangan yang sering memicu konflik antaretnis,
- d. Kesatuan tempat tinggal yang berkelompok dan penggunaan bahasa masing-masing etnis di ruang publik. Hal ini kadang menciptakan jarak,
- e. Masih berkembang dan bertahannya stereotip dan perbedaan perbedaan antar etnis,
- f. Berkelompok merupakan strategi untuk tetap *survive* dari ancaman fisik, ataupun persaingan hidup, baik secara sosial ataupun ekonomi.

Masalah etnis di Kalimantan Barat maupun di Pontianak masih menjadi hal yang sensitif. Kerusuhan akhir pemerintahan Presiden Soeharto masih membekas dan menimbulkan trauma mendalam bagi warga masyarakat Kalimantan Barat. Oleh sebab itu gesek-gesekan antar suku sebisa mungkin dicegah agar konflik serupa tidak muncul lagi. Orang Dayak kerap menjadi *underdog* jika dibandingkan dengan orang Melayu. Pemerintah Orde Baru juga telah mengubah tanah-tanah adat untuk dibuka dan ditebangi pohonnya menjadi daerah transmigrasi. Dengan janji bahwa hal tersebut akan menguntungkan mereka akan tetapi malah sebaliknya semakin memperburuk kondisi orang Dayak (Tanasaldy, 2007:476).

Walaupun kebijakan anti-SARA sangat ketat, Pemerintahan Orde Baru tidak dapat mencegah terjadinya konflik etnis antara Suku Dayak dan Madura. Aparat pemerintah dan para pakar ilmu sosial yang mengkaji tentang masalah tersebut memberikan kesimpulan bahwa orang Madura dalam hal berbudaya masih kurang sensitif dan semena-mena terhadap orang di sekelilingnya (Tanasaldy, 2007:472). Konflik etnis pada tahun 1996-1997 menjadi kulminasi dari akumulasi tekanan-tekanan kebijakan Orde Baru. Konflik tersebut merupakan konflik paling keras antara orang Dayak dan orang Madura dalam sejarah Kalimantan Barat. Setelah orang Dayak lama dipinggirkan akhirnya mereka menegaskan diri yang dalam hal ini diarahkan kepada para pendatang keturunan Madura.

Stereotipe etnik memang sudah tersebar luas termasuk di Pontianak. Etnis Melayu disebut sebagai orang-orang Muslim, terpelajar, sudah terurbanisasi, dan memiliki status sosial yang lebih tinggi dari orang Dayak yang Kristen dan pedesaan. Orang Cina dianggap eksklusif dan kaya, sementara Madura dianggap miskin, tidak terpelajar, kasar, dan melekat kuat dengan para pemimpin agama mereka dari Madura. Akan tetapi tidak semua orang Cina kaya. Menurut Alqadrie (dalam Wenty (2016:150) dewasa ini banyak orang Dayak yang beragama Islam menolak disebut sebagai Melayu dan menyebut diri mereka sebagai Dayak Muslim.

## **VI. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dewasa ini Pontianak telah menjadi salah satu kota dengan tingkat pluralitas yang tinggi. Pontianak memiliki potensi untuk berkembang menjadi kota yang maju. Namun salah satu faktor pendukung percepatan perkembangan kota tersebut adalah terciptanya masyarakat multikultur. Merunut dan mengacu pada pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya,

maka cita-cita menjadi masyarakat multikultur di Pontianak memerlukan kesadaran masyarakat yang serius, mengingat karakteristik masyarakat yang belum cukup mendukung untuk terciptanya kondisi tersebut.

Stereotipe etnik yang masih cenderung telah tertanam serta seolah tumbuh dari dalam diri masyarakatnya adalah hambatan yang tidak terelakkan. Reproduksi dan konservasi stereotipe sebagai basis pemaknaan antara satu kelompok dengan kelompok lain, dan terdapat beberapa kelompok yang menggenggam keyakinan, bahwa multikultur tidak sesuai dengan kesempurnaan keyakinannya. Hal ini yang masih menjadi kendala terwujudnya masyarakat plural yang multikultur. Akan lebih lama lagi terwujudnya cita-cita tentang keindahan aneka warna dalam satu kesatuan. Besar harapan bahwa hal tersebut bukan karena ketakutan akan keterbukaan dan persaingan untuk menjadi maju bersama. Musuh kita bukanlah suatu kelompok dalam masyarakat namun adalah disintegrasi.

## **B. Saran**

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan Kota Pontianak, dan keberadaan berbagai kelompok etnis, berakibat pada kehidupan sosial budaya Pontianak sebagai kota semakin heterogen. Oleh karena itu pemerintah daerah seyogyanya semakin meningkatkan pembatasan penduduk pendatang dari daerah lain, dengan cara menyusun dan menerapkan peraturan secara ketat tentang pembatasan migrasi dari luar daerah.

Berbagai kelompok etnis dari negara lain dan dari berbagai wilayah di Indonesia, berpotensi besar menimbulkan terbentuknya kondisi sosial heterogen di Pontianak. Hal ini tidak mudah untuk membangun pluraritas. Potensi munculnya sentimen kedaerahan, baik itu klaim oleh penduduk lokal, maupun oleh mereka yang merupakan kelompok-kelompok penduduk pendatang, perlu dikontrol atau dikendalikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang adil dan manusiawi, agar tidak berakibat pada munculnya kecemburuan sosial antar etnis lokal maupun pendatang, yang dapat memicu perpecahan dan ketidak amanan kehidupan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azra, A., (2013). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII, Akar Pembaharuan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bartels, A., & Wiemann, D., (2007). *Global Fragments (Dis)Orientation in The New World Order*. Amsterdam: Rodopi.
- Bruner, E. M., (1961). Urbanization and Ethnic Identity in North Sumatra. *American Antropologist*, 508-521.
- Gin, O. K., (2011). *The Japanese Occupation of Borneo, 1941-1945*. New York: Routledge.
- Hasanuddin, (2014). *Pontianak Masa Kolonial*. Yogyakarta: Ombak.
- Hasanuddin, Purwana, B. H., & Sulistyorini, P., (2000). *Pontianak 1771-1900: Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Ekonomi*. Pontianak: Romeo Grafika.
- Heidhues, M. S., (2008). *Golddiggers, Farmers, and Traders in the "Chinese District" of West Kalimantan, Indonesia*. (A. Salmin, & S. Mihardja, Trans.) Jakarta: Yayasan Nabil.
- Poerwanto, H., (2014). *Cins Khek di Singkawang*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Ricklefs, M. C., (2001). *History of Modern Indonesia since C. 1200 3rd ed*. Hampshire: Palgrave.
- Ricklefs, M. C., (2011). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Sjamsuddin, H., (2013). *Perlawanan dan Perubahan di Kalimantan Barat, Kerajaan Sintang 1822-1942*. Yogyakarta: Ombak.
- Soekanto, S., (2001). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tanasaldy, T., (2007). Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat. In H. S. Nordholt, & G. v. Klinken, *Renegotiating boundaries; local politics in Post-Suharto Indonesia* (B. Hidayat, Trans., pp. 461-490). Jakarta: KITLV-Jakarta, Obor.
- Veth, P., (1992). *Borneo's Wester Afdeeling, Geographisch, Statistisch, Historisch, vooratgegaan door een algemene schets des gangsche eilands*. Singapura: Periplus Editions.
- Wenty, M. M., (2016). Etnisitas dan Cita-Cita Kerja Orang Muda di Pontianak. In G. v. Klinken, & W. Berenschot, *In Search of Middle Indonesia: Middle Classes in Provincial Towns* (E. R. Terre, Trans., pp. 141-167). Jakarta: Obor; KITLV-Jakarta.